

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**IRWANDI**  
**NIM. 11375104878**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Pada  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**IRWANDI  
NIM. 11375104878**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IRWANDI  
 NIM : 11375104878  
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN  
 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN  
 PUBLIK LOKAL  
 HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis, 23 April 2020

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
NIP: 130712074

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara

Dr. kamaruddin, S.Sos, MSi  
NIP. 19790101 200710 1 003



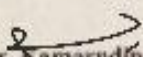
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IRWANDI  
NIM : 11375104878  
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN  
2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN  
PUBLIK LOKAL  
HARI/TANGGAL UJIAN : Kamis, 23 April 2020

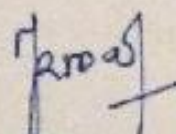
#### PANITIA PENGUJI :

##### KETUA

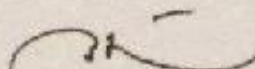
  
Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si  
NIP: 19790101 200710 1 003

##### ANGGOTA

##### PENGUJI I

  
Virna Museliza, SE, M.Si  
NIP. 130 712 073

##### PENGUJI II

  
Muslim, S.Sos, M.Si  
NIP: 19820205 201503 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

IRWANDI  
11375104878

Dalam memenuhi tuntutan rakyat akan adanya keterbukaan informasi perusahaan mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang merupakan upaya memberi hak atas frekuensi sebagai wilayah public. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Pada pasal 14 ayat 3 dikatakan “Didayah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal”. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Lingga. Analisa data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) yang sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan didalam pengimplementasian suatu kebijakan peraturan Pemerintah Daerah dengan baik. seperti setiap program yang telah disusun dengan rapi, walaupun dalam memberikan hiburan juga menyampaikan sumber informasi kepada masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, anggaran, fasilitas pendukung didalam melaksanakan kebijakan dan kemampuan didalam melaksanakan organisasi.

**Kata Kunci : Perda No 03 Th 2012, Penyiaran**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'amin, tiada kata yang paling indah selain mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahummashalli'ala Syaidina Muhammad Wa'alaalihi Syaidina muhammad, yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan memberikan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia.

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUNDA TANAH MELAYU"** diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau. Dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orangtua tercinta dan terhormat yang telah membesarkan dengan segala kasih sayang dan selalu berdo'a serta memberikan dukungan kepada penulis.
2. Saudara-saudara dikampung halaman yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi agar penulis menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktunya yang berharga untuk kesempurnaan dari skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas segala informasi-informasi berharga yang diberikan selama ini.

6. Buat saudara saya, Ari Naldy dan semua rekan-rekan selama perkuliahan yang selama ini telah banyak memberikan do'a dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Buat sahabat saya Said Fatra serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat dan Motivasi serta keceriaan yang kalian berikan.

8. Buat seluruh temanseperjuangan lokal Administrasi Negara J yang telah banyak memberikan semangat serta keceriaan yang kalian berikan.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua jasa yang telah mereka berikan, Amin. Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan yang penulis miliki dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 05 Maret 2020  
Penulis

**IRWANDI**  
**NIM. 11375104878**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Implementasi Kebijakan .....	12
2.2 Lembaga Penyiaran Publik .....	21
2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 .....	24
2.4 Konsep Tentang Adminitrasi Negara .....	26
2.5 Kajian Tentang Kebijakan Publik .....	27
2.6 Pendangan Islam Tentang Implementasi .....	35
2.7 Penelitian Terdahulu .....	37
2.8 Konsep Operasional .....	39
2.9 Kerangka Pemikiran .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Populasi Dan Sampel .....	42
3.4 Sumber Dan Jenis Data .....	43
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	44
3.6 Teknik Analisa Data .....	46



<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Sejarah Umum Kabupaten Lingga .....	48
4.2 Kabupaten Lingga Dan Geografis.....	50
4.3 Lambaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu.....	52
4.4 Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga .....	53
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
5.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga .....	54
5.2 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Lokal Radio Bunda Tanah Melayu.....	64
5.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penyelenggaraan Penyiaran Di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga .....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
6.1 Kesimpulan .....	72
6.2 Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang BTM Kab Lingga.....	7
Tabel 1.2 Jumlah Iklan Masuk Bagian Pemasaran LPPL Bunda Tanah Melayu Kabupaten Linga .....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	37
Tabel 2.2 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3.1 Sampel Dalam Penelitian .....	42

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Model Pendekatan <i>A Framework For Implementation</i> .....	16
Gambar 2.2 Model Pendekatan <i>Direct And Indirect Impact On Implementation (George Edward III)</i> .....	17
Gambar 2.3 Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Proses (Donald Van Meter Dan Carl Van Horn)</i> .....	20
Gambar 2.4 Diagram Proses Kebijakan Publik .....	33
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Revolusi teknologi dan globalisasi informasi telah mendorong terjadinya proses demokratisasi di masyarakat. Perkembangan tersebut telah melahirkan masyarakat yang semakin kritis dan semakin peduli terhadap kebijakan-kebijakan publik yang berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan pribadinya. Pemerintah harus *responsive* dan akomodatif untuk menyediakan keterbukaan dan transparansi mengenai informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi sebagai bentuk pelayanan terhadap kebutuhan publik.

Negara dalam memenuhi tuntutan rakyat akan adanya keterbukaan informasi berusaha mengembangkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang merupakan upaya memberi hak atas frekuensi sebagai wilayah publik (*public sphere*). Wilayah publik ialah sebuah wilayah sosial yang terbuka, bebas dari sensor dan dominasi, yang memungkinkan kehidupan kehidupan sosial manusia membentuk opini publik yang relative bebas. Keberadaan LPP sebagai wilayah publik (*public sphere*) merupakan bentuk implementasi negara terhadap keterbukaan informasi publik yang mana memberi ruang bagi publik untuk bersama-sama belajar memahami satu sama lain. Penekanannya mengenai pembentukan kepekaan masyarakatan (*sense of public*) berpartisipasi dalam kehidupan.

Untuk menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan

1. Dikemukakan pengaturan penyelenggaraan penyiaran Indonesia. Pada pasal 14 ayat 3 dikatakan “Didaerah, Provinsi, Kabupaten, atau Kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal”. Setiap wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota memberikan kewenangan untuk mendirikan LPP sebagai pelayanan keterbukaan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan serta menjalin komunikasi kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik memperkuat keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) untuk didirikan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia.  
Kabupaten Lingga dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu membentuk sebuah media untuk menyampaikan segala keterbukaan informasi kepada masyarakat Kabupaten Lingga. Langkah yang diambil adalah mendirikan LPPL yang diberi nama Bunda Tanah Melayu (BTM) sebagai penyelenggara penyiaran Publik. Awalnya, penyelenggaraan LPPL berdasarkan pada Peraturan Bupati Lingga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Radio Bunda Tanah Melayu FM sebagai LPPL di kabupaten Lingga, berada dibawah koordinasi Kepala subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. LPPL menjadi tempat penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat untuk mengajak berpartisipasi dan semakin kritis terhadap kemajuan pembangunan dan mengontrol jalannya pemerintahan.  
Namun didalam pengajuan legalitasnya melalui proses yang panjang. Legalitas itu diperoleh setelah melalui proses panjang dengan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan berkas permohonan, pelaksanaan Forum Rapat Bersama
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. (FRB) penerbitan IPP sementara, pengurusan Izin Stasiun Radio, evaluasi uji coba siaran, hingga pada akhirnya oleh Kemkominfo RI melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Izin Prinsip Penyiaran (<https://probatam.co/2019/07/09/lppl-radio-bunda-tanah-melayu-resmi-mengudara-di-lingga/>)
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Radio Bunda Tanah Melayu ini resmi sebagai satu-satunya LPPL yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lingga dengan frekuensi 88.0 FM sesuai keputusan forum rapat bersama antara Kemenkominfo RI, KPI Pusat, KPID Kepri dan Balmon Kelas II Batam. Sejak dari awal berdirinya pada tahun 2008. Izin ini tercatat mulai tanggal 8 Juli 2019 yang akan belaku selama 5 tahun kedepan. RBTM mendapatkan izin penyiaran tersebut setelah melalui berbagai proses pengajuan, termasuk pengurusan izin stasiun radio hingga uji coba siaran. Radio Bunda Tanah Melayu yang merupakan salah satu bagian dari Kominfo dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga ini baru pertama kalinya menerima IPP tetap. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Bunda Tanah Melayu (RBTM) yang mengudara di kawasan Kabupaten Lingga kini resmi mengantongi Izin Prinsip Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Sejak lebih dari 10 tahun berdiri, Ima menyebutkan RBTM harus mengikuti ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana yang telah ditentukan. IPP tersebut dapat saja ditarik jika suatu saat tidak mentaati peraturan yang berlaku. Ima juga menerangkan jika, IPP tersebut dilarang dipindah tangankan ke pihak lain termasuk IPP yang diberikan kepada badan hukum tertentu, dijual, dialihkan



1. kepada badan hukum lain atau perseorangan. Radio yang berada di frekuensi 88.0 MHz ini terbilang cukup lama menjadi sarana informasi masyarakat di Kabupaten Lingga. Diharapkan pula dengan adanya izin tersebut dapat menjadi media yang membantu perkembangan dan pembangunan oleh Pemkab Lingga. Mengingat RBTM merupakan bagian dari Kominfo dan Humas Sekretariat Daerah Pemkab Lingga (<https://kumparan.com/kepriedia/rbtm-lingga-resmi-dapat-izin-penyiaran-1rRIj5zTTw4/full>)
2. Adapun fenomena yang terjadi dimana LPPL mengalami kendala dalam pelaksanaan penyiaran. Terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran dana pembiayaan LPPL yang berasal dari Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) mengganggu kegiatan penyelenggaraan penyiaran. Dimana pada saat itu terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai selama 6 bulan, kendala kerusakan peralatan teknik operasional yang menyebabkan stasiun penyiaran radio tidak dapat melaksanakan produksi penyiaran selama lebih kurang 3 bulan. Dengan kedudukan tersebut, kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran publik lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Menyikapi kendala tersebut, LPPL kemudian mengajukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lingga untuk mengubah kebijakan peraturan penyelenggaraan penyiaran publik lokal Kabupaten Lingga. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin banyak tuntutan akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa

implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran lokal. Penyiaran telah

menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran,

dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut,

pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di

Indonesia. Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga selama ini berada

dibawah koordinasi Kepala subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum

dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Dengan kedudukan

tersebut, maka kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran publik

lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Oleh karena itu, dengan terbitnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka keberadaan

lembaga penyiaran milik pemerintah daerah harus disesuaikan dengan

membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.

Dalam perkembangannya, pemerintah menetapkan kebijakan baru berupa

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga sebagai pengganti terhadap

Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2008. Adanya perda memberikan dasar hukum

keberadaan LPPL yang kedudukannya di akui segara legalitas. LPPL menerapkan

sistem siaran berjaring yang merupakan pelaksanaan desentralisasi penyiaran

dimana terdapat kerja sama antara stasiun pusat dengan stasiun daerah. Radio

BTM dalam pelaksanaan sistem siaran berjaring terhubung dengan Radio

Republik Indonesia (RRI) Tanjung Pinang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perda nomor 03 tahun 2012 tentang lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Lingga memberikan kewenangan dan ruang gerak perkembangan keberadaan LPPL Kabupaten Lingga. Perda tersebut mengatur LPPL mulai dari pembentukan, kedudukan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi, kepemimpinan, tata kerja serta pembiayaan dan pendapatan LPPL. Adanya Perda tersebut, diharapkan LPPL dapat meningkatkan produktivitas baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga. Peraturan yang dibuat pemerintah tersebut, tentunya harus diimplementasikan demi memenuhi pelayanan terhadap keinginan publik untuk mendapatkan keterbukaan informasi.

Hasil pengamatan diperoleh informasi perubahan kebijakan dari peraturan bupati menjadi perda salah satunya ialah bagian struktur organisasi, ditambah adanya bagian stasiun penyiaran. Pada perda pasal 6 ayat 1 menyebutkan “susunan organisasi LPPL terdiri dari : dewan pengawas, dewan direksi dan stasiun penyiaran”. Sedangkan struktur LPPL BTM hingga saat ini tidak ada pegawai bagian stasiun penyiaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari perda.

Berdasarkan perda, stasiun penyiaran merupakan “penyelenggara kegiatan penyiaran radio maupun televisi yang berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga. LPPL dapat mendirikan stasiun cabang pada setiap kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga yang ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan tertulis dari dewan pengawas”. Hingga saat ini, yang menjadi penyelenggara kegiatan penyiaran ialah pegawai yang bekerja pada bagian penyiaran dan pemberitaan.



1. Mereka bekerja merangkap tugas mengelola kegiatan penyiaran dan merancang program acara serta melaksanakan kegiatan siaran radio bidang informasi, hiburan dan iklan. LPPL juga tidak melakukan pendirian stasiun cabang disetiap kecamatan diwilayah Kabupaten Lingga sebagai pengembangan penyiaran.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah pegawai berdasarkan bidang BTM Kabupaten Lingga**

No	Bidang kepegawaian	Personil
1.	Dewan Pengawas	3
2.	Dewan Direksi	3
3.	Bagian Produksi dan Teknisi	3
4.	Bagian penyiaran dan pemberitaan	7
5.	Bagian Administrasi, Perlengkapan dan rumah tangga	2
6.	Bagian Pemasaran dan Humas	2
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

*Sumber data : LPPL BTM 2016*

Berdasarkan perda pasal 10 menjelaskan “Tugas dewan direksi memimpin dan mengelola LPPL sesuai tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran”. Ketentuan operasional lembaga yang dibuat direksi akan berpengaruh pada perekrutan dan penempatan pegawai yang akan bekerja menjalankan tujuan lembaga. Ketentuan operasional penyiaran akan memberikan petunjuk kerja bagi pegawai yang akan memberikan pengaruh terhadap kualitas produksi siaran yang berdampak pada ketertarikan seluruh masyarakat kabupaten lingga untuk mendengarkan radio. Sehingga dari banyaknya jumlah pendengar yang berpartisipasi di radio akan mempengaruhi pengusaha maupun instansi-instansi untuk memasang iklan yang akan memberikan kontribusi bagi pendapatan LPPL yang kemudian disetorkan ke kas pemerintah Kabupaten Lingga.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah iklan masuk bagian pemasaran LPPL Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga**

Bulan	2014	2015	2016
Januari	2	2	6
Februari	9	3	0
Maret	5	6	0
April	5	5	0
Mei	8	6	5
Juni	0	4	7
Juli	5	4	1
Agustus	4	2	0
September	7	2	0
Oktober	5	8	0
November	8	9	2
Desember	5	5	1
<b>Jumlah</b>	<b>63</b>	<b>53</b>	<b>22</b>

*Sumber data : LPPL Bunda Tanah Melayu*

Penelitian yang dilakukan oleh Asmu'I tentang implementasi Kebijakan Penyiaran pada lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Kalimantan selatan dalam jurnal penelitian "pers dan komunikasi pembangunan volume 16 No 3 februari 2013", implementasi kebijakan yang pada operasional penyiaran terjadi rangkap kerja dikarenakan tidak meratanya kemampuan sumber daya manusia menyebabkan penyelenggaraan penyiaran belum dapat berjalan dengan lancar dan optimal. Rendahnya profesionalisme karyawan dan sarana peralatan teknik produksi yang kurang memadai menjadi hambatan dalam penyelenggaraan siaran.

Didasari yang terjadi di LPPL BTM, maka tertarik untuk menganalisa permasalahan kedalam sebuah penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka dirumuskan permasalahan :

Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu?

Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan penyiaran di LPPL Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Lokal Radio Bunda Tanah Melayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelenggaraan penyiaran di LPPL Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan khususnya kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga.



Secara Akademis

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan datang atau bagi peneliti selanjutnya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari.
3. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan, pemahaman, penalaran, pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial khususnya Ilmu Administrasi Negara.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini mengemukakan teori yang berhubungan dengan judul penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang lokasi penelitian, jenis data, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis memuat sejarah singkat berdirinya perusahaan, kegiatan, aktifitas, dan pertumbuhan perusahaan serta struktur organisasi perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang rangkuman pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang bermanfaat.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar kebijakan tersebut tidak hanya akan sekedar berupa rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tetapi suatu tindakan mencapai tujuan yang akan memberikan dampak setelah dilaksanakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Nugroho; 2003 : 160) mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan kejadian dalam kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Berdasarkan pandangan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa proses implementasi kebijakan itu bersangkut paut tidak hanya dengan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan program, tetapi juga berpengaruh terhadap dampak dimasyarakat.

Menurut Lester dan Stewart (Winarno; 2012 : 147) implementasi dipandang secara luas, mempunyai makna “pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”. Implementasi disini diartikan sebagai salah satu





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses dimana undang-undang diterapkan dalam lingkungan dan pihak yang terlibat bekerja sama untuk menjalankan program sesuai peraturan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut Santosa (2012:43) adalah “aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif”. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari berbagai kegiatan yang dijalankan secara efektif untuk mencapai tujuan.

Menurut Ripley dan Franklin, sebagaimana dikutip Winarno (2012:148) “implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output)”. Konsep implementasi ini menunjuk pada kegiatan maupun tindakan yang dilakukan setelah diterapkannya peraturan yang mana memberikan kewenangan untuk membuat program yang memiliki dampak setelah dilaksanakannya.

Winarno (2012:148) berpendapat “implementasi melibatkan sejumlah aktor, organisasi, dan teknik-teknik pengendalian”. Pelaksanaan dari sebuah kebijakan melibatkan para pegawai sebagai aktor yang terlibat untuk menjalankan kebijakan dalam mengatur organisasi diperlukan teknik pengendalian agar kebijakan tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Menurut Grindle (Winarno; 2012 : 149) menyatakan “tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pemerintah”. Tugas dari implementasi mencakup menjalin hubungan antara pemerintah dengan masyarakat untuk mempermudah penerapan kebijakan direalisasikan dalam lingkungan sebagai bentuk tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno;2012:149) implementasi adalah “sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Nugroho (2003:158) menyatakan “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Untuk mengimplementasikan hasil kebijakan publik, maka ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa, dalam suatu kebijakan faktor yang utama yang harus diperhatikan adalah bagaimana pelaksanaan dari suatu kebijakan yang dibuat. Karena sebegus apapun sebuah kebijakan yang dibuat jika tidak dilaksanakan, makaa tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Menurut Mazmanian dan Sabartier (Agustino;2008 :144-149) “peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

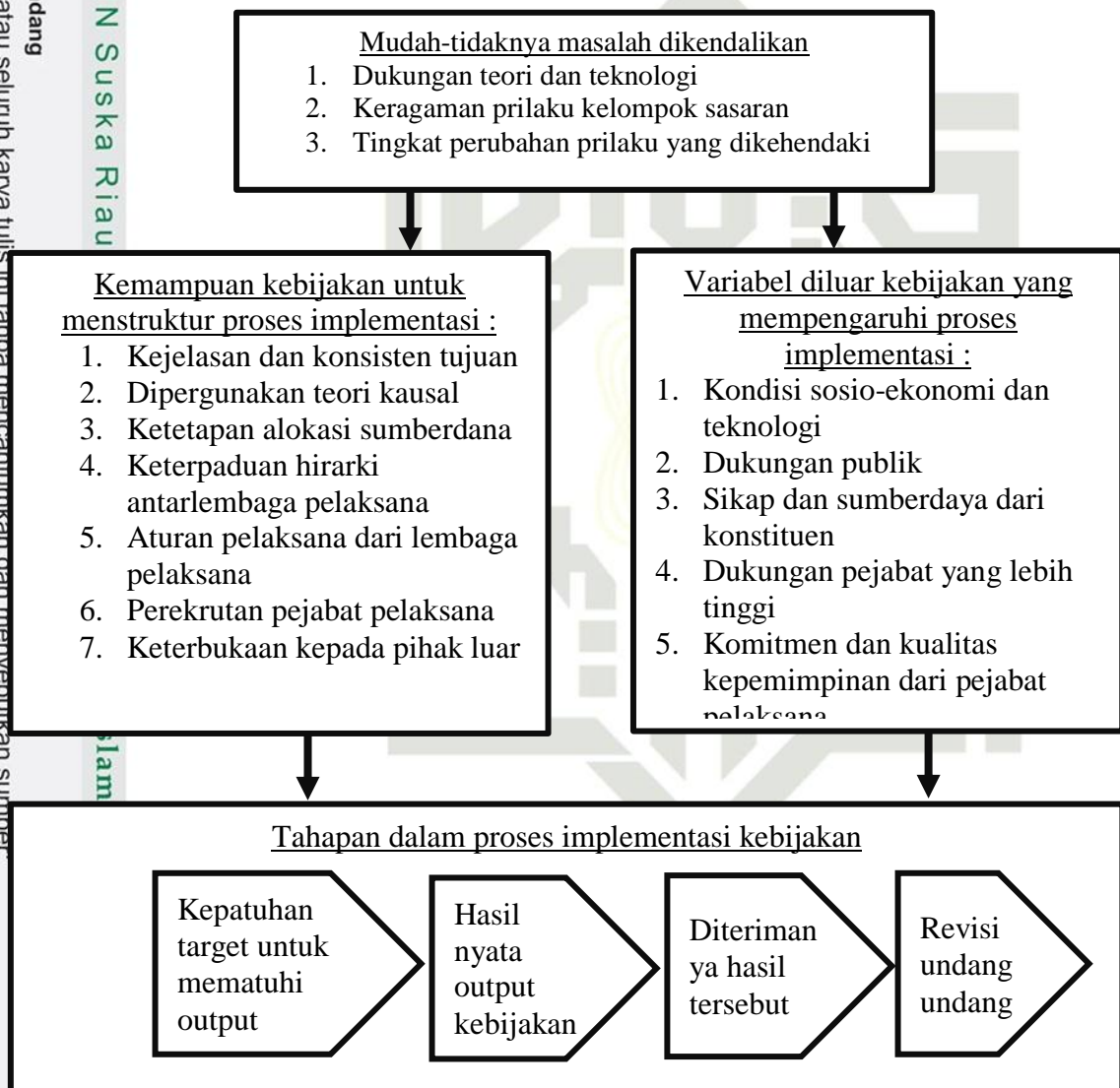
tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
  - a. Kesukaran-kesukaran teknis,
  - b. Keberagaman perilaku yang diatur,
  - c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran,
  - d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.
2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, meliputi :
  - a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang dicapai,
  - b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan,
  - c. Ketetapan alokasi sumberdana,
  - d. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.
  - e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana,
  - f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
  - g. Akses formal pihak-pihak luar.
3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi, meliputi :
  - a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
  - b. Dukungan publik



- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.
- d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

**Gambar 2.1**  
**Model pendekatan A Framework for Implementation Analysis**



**Sumber : mazmanian dan sebartier (Agustino; 2008 : 149)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ilman Syarif Kasim Riau

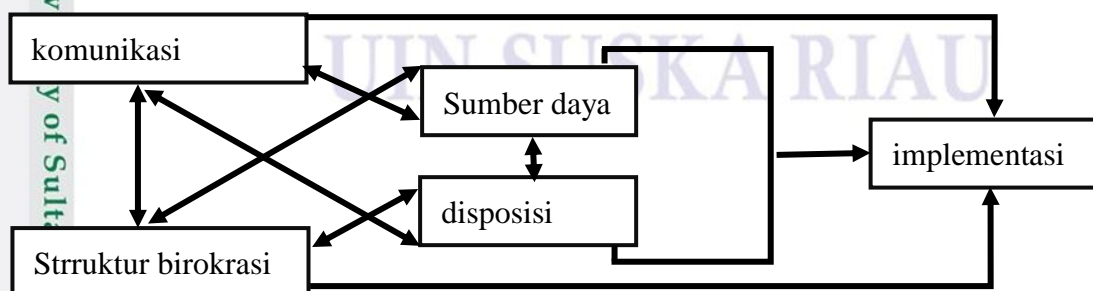
# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Edward III (Agustino;2008 : 148) “terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila mereka yang melaksanakan keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Indikatornya : transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
2. Sumberdaya. Merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan. Terdiri dari staff, informasi, wewenang, dan fasilitas.
3. Disposisi. Para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Indikatornya : pengangkatan birokrat dan insentif.
4. Struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Indikatornya : Standar Operating Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

**Gambar 2.2**  
**Model pendekatan *Direct and Indorect Impact On Implementation* (George Edward III)**



**Sumber : Edward III (Agustino; 2008 : 150)**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model implementasi kebijakan ini membahas faktor yang menghambat dan membantu jalannya suatu kebijakan. Implementasi dari setiap kebijakan melewati proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi yang akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino; 2008 : 141-144) proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan implementasi kebijakan berjalan linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari penilaian sejauh mana ukuran dan tujuan dari sebuah kebijakan telah direalisasikan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

3. Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.

4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

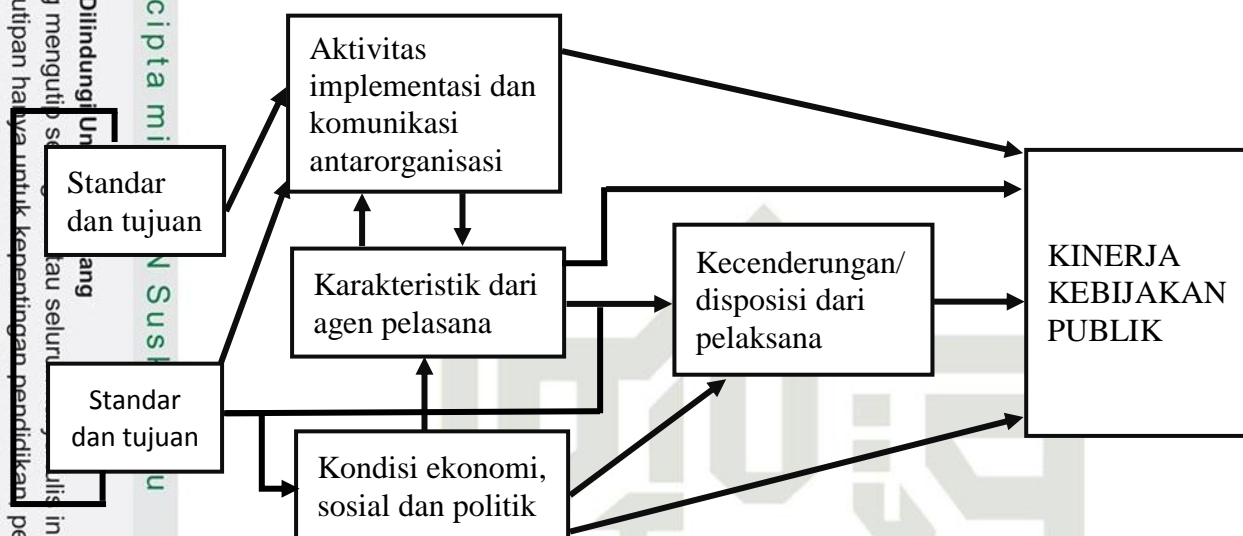
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

UIN SUSKA RIAU

**Gambar 2.3**  
**Model pendekatan *The Policy Implementation Process***  
**(Donald Van Meter dan Carl Van Horn)**



**Sumber : Van Meter dan Van Horn (Agustino;2008 : 144)**

Model implementasi kebijakan ini membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Implementasi kebijakan merupakan proses penting, karena disini dapat terlihat sebuah kebijakan yang diterapkan dengan baik atau tidak akan mempengaruhi kinerja organisasi serta diketahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan dari sebuah kebijakan.

Diantara ketiga model implementasi kebijakan menurut para ahli, model implementasi Van Meter dan Van Horn dianggap lebih baik untuk mengkaji implementasi peraturan daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu. Hal ini disebabkan penelitian ingin melihat dan menilai proses administrasi yang dilakukan oleh implementor dalam menerapkan Perda sebagai aturan dalam penyelenggaraan penyiaran dan melihat keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan.

## 2.2 Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (Public Broadcasting) atau dikenal juga dengan sebutan Public Service Broadcasting (PBS) adalah penyiaran dibuat, dibiayai dan dikontrol oleh publik, untuk publik. Hal ini tidak komersial maupun milik negara, bebas dari campur tangan politik dan tekanan dari kekuatan komersial (iklan). LPP merupakan milik negara yang bersifat independen, bebas dari tekanan lingkungan dan penyiarnya untuk kepentingan publik.

Menurut UNESCO, sebagaimana dikutip Wiratmo (2011:4) mengatakan “Public Broadcasting adalah organisasi penyiaran milik publik, yang berbicara kepada semua orang sebagai warga negara. Lembaga penyiaran publik mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik. Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas wawasan dan memungkinkan orang untuk lebih memahami diri, dunia dan lain-lain dengan pemahaman yang lebih baik.

Pandangan ini menjelaskan LPP sebagai pemersatu dan pemberi semangat kepada semua orang untuk ikut serta dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat dapat mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan melalui informasi yang disampaikan, sehingga lebih memahami diri sendiri dan lingkungan serta kritis terhadap perubahan yang terjadi.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Banerjee dan Seneviratne (Wiratmo; 2011 : 4) “penyiaran publik didefinisikan sebagai tempat pertemuan di mana semua warga menyambut baik dan dianggap setara. Informasi dan program edukasi yang dapat di akses oleh dan untuk semua, apapun latar belakang maupun status sosial atau ekonominya”. LPP merupakan media tempat semua orang bisa mendengarkan dan mengakses informasi dan program lainnya tanpa memandang perbedaan. Memiliki kebebasan yang sama menikmati apa yang disajikan LPP tanpa tekanan.

Menurut UNESCO (Wiratmo;2011 : 5) “lembaga penyiaran yang ideal bersifat, yaitu :

- 1) *Universality* (universalitas) : penyiaran publik harus dapat diakses oleh setiap warga diseluruh tempat.
- 2) *Diversity* (keanekaragaman) : layanan yang ditawarkan oleh penyiar publik harus terdiversifikasi di setidaknya tiga cara : genre program yang ditawarkan, para penonton yang ditargetkan, dan subyek yang dibahas.
- 3) *Independence* (independensi) : penyiaran publik merupakan forum dimana ada kebebasan ide, yaitu saat dimana informasi pendapat dan kritik dapat beredar.
- 4) *Distinctiveness* (kekhususan) : layanan yang ditawarkan oleh penyiaran publik harus berbeda dari jasa penyiaran lainnya.

LPP sebagai lembaga penyiaran yang ideal, bisa diakses semua orang tanpa status perbedaan. Layanan yang ditawarkan harus mencerminkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keragaman kepentingan melalui berbagai jenis program, sehingga siarannya dapat memberi pencerahan dan menarik semua kalangan. Kebebasan penyiaran publik juga jauh dari pengaruh komersial atau politik. Dalam program layanan publik, Nampak kualitas dan karakter khusus dari program-programnya, masyarakat harus dapat mengidentifikasi apa yang membedakan layanan ini dari jenis layanan penyiaran lainnya.

Wiratmo (2011:8) menyebutkan LPPL memiliki “tiga fungsi utama, yaitu :

1. Memberi kesempatan bagi publik untuk berperan serta menyuarakan pikiran dan keinginannya berkaitan dengan program siaran.
2. Sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat yang kepentingannya tidak terwadahi dan diberikan oleh lembaga penyiaran swasta maupun berlangganan.
3. Mengangkat nilai-nilai lokal dengan segala perniknya, ragam budaya, karakter masyarakatnya dan sebagainya”.

Berdasarkan pendapat Wiratmo menunjukkan keberadaan LPPL menjadi penting. LPPL menjadi wadah bagi publik untuk aktif berpartisipasi dalam menyuarakan kepentingan dalam memperoleh informasi serta menunjukkan kreatifitas nilai lokal untuk menjaga kearifan budaya daerah.

Menurut Wiratmo (2011:7) “Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat diumpamakan sebagai ‘taman penyiaran’ menjadi tempat bertemunya berbagai kepentingan dan lapisan masyarakat. Sebagai bentuk fasilitas

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum (fasum) di udara untuk memberi kenyamanan bagi publik yang kepentingannya tak terwakili oleh media arus utama (media mainstream)”. PPL merupakan media tempat semua jenis lapisan masyarakat dengan berbagai kepentingan bertemu dalam sebuah fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kenyamanan masyarakat mengungkapkan kepeduliannya terhadap lingkungan.

### 2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012

#### 1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Pada pasal 4 disebutkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

#### 2. Sumber daya

Pada pasal 6 susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :

- a. Dewan pengawas
- b. Dewan direksi
- c. Stasiun penyiaran

Anggaran pembiayaan dan pendapatan di atur dalam pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan ayat (2) pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari siaran iklan dan sumbangan pengguna jasa penyiaran.

### 3. Karakteristik agen pelaksana

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan anggota dewan pengawas berjumlah 3 orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi ketua dewan pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota dewan pengawas.

Pada pasal 9 ayat (1) anggota dewan direksi berjumlah 3 orang, yang terdiri atas 1 orang direktur utama sebagai penanggung jawab umum, 1 orang direktur umum, dan 1 orang direktur program dan operasional.

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan Stasiun Penyiaran merupakan penyelenggara kegiatan penyiaran radio maupun televisi lokal yang berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga.

### 4. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana

Pada pasal 26 menyebutkan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Lingga.

### 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Pada pasal 10 ayat (8) menyebutkan tugas dewan direksi menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Lingga maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Pada pasal 23 ayat (1) menyebutkan “dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai tugas masing-masing.

## 2.4 Konsep Tentang Administrasi Negara

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelaksanaan penyiaran publik, terlebih dahulu melihat makna administrasi. Menurut Siagian (2008:2) administrasi adalah “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Berdasarkan pendapat Siagian, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan tertentu. Terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu : dilakukan sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi, berlangsung dalam jalinan kerjasama, dan menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pandangan Dimock (Ibrahim;2009 : 1) “administrasi negara merupakan kegiatan suatu pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan dan kebijakan politik”. Pandangan ini menyebutkan bahwa Administrasi negara merupakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan untuk mengatur dan membuat berbagai kebijakan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

John M. Pffifner dan Robert V. Presthus dalam Syafiie (2009: 31), memberikan definisi administrasi negara sebagai berikut:

1. Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik
2. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah
3. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan publik adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana setelah kebijakan ditetapkan untuk memberikan dampak pada publik. Kebijakan tersebut diterapkan oleh para administrator agar memberikan output nyata dari sebuah kebijakan.

## 2.5 Kajian Tentang Kebijakan Publik

### a. Konsep Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan juga diartikan keputusan yang menjadi pedoman tingkah laku yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara sengaja guna mengatasi masalah.

Presthus (Santosa; 2012 : 34) mengatakan “bahwa kebijakan dalam pengertiannya yang paling fundamental adalah, satu pilihan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau mengerangkakan seperangkat tindakan, baik nyata maupun tidak”. Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil sekelompok orang sebagai aturan yang diberlakukan untuk memberi petunjuk dalam mengambil tindakan.

Carl Frediedrich (Winarno;2012 : 20-21) memandang kebijakan sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”. Pandangan ini menganggap kebijakan sebagai tindakan yang diusulkan oleh pihak yang berkepentingan atau pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah atau persoalan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Anderson (Winarno;2012 : 21) “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi persoalan”. Konsep ini memusatkan pada apa yang dilakukan, sebuah keputusan dari berbagai alternative yang ada. Lebih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut, Anderson menjelaskan “suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya”. Artinya kebijakan tidak hanya sekedar peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mengatasi permasalahan, didalam kebijakan juga terdapat tata cara implementasi/pelaksanaan dari kebijakan yang telah diputuskan.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai aktor untuk mengatasi masalah, biasanya untuk kepentingan publik. Dimana dalam penyelenggaraan bernegara, terjadi kehidupan yang kompleks. Sehingga, pemerintah membuat sebuah keputusan untuk penanganan dari permasalahan-permasalahan yang ditetapkan menjadi kebijakan yang berbentuk peraturan. Kebijakan pada intinya berisikan hal-hal yang mengatur kepentingan publik.

#### b. Makna Publik

Publik dalam berkehidupan, didefinisikan sebagai sekelompok individu atau manusia dalam jumlah yang besar. Mereka mempunyai tujuan yang lebih terarah, dan teratur serta menjalin hubungan satu sama lain.

Pandangan yang sama mengenai publik dijelaskan Inu dkk (Sinambela; 2011 : 4) “pubik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang merasa memiliki”. Pubik dipandang sebagai sekelompok manusia yang memiliki kesamaan terhadap berbagai hal diatur berdasarkan nilai dan norma yang mereka sepakati.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Publik selalu dikaitkan dengan kebijakan. Menurut Abidin (2012:7) pengertian “publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum”. Publik merupakan pemerintah yang membuat kebijakan untuk masyarakat yang menjadi objek kebijakan dan berlaku untuk umum. Jadi, semua orang yang berada pada satu lingkungan yang sama-sama diatur oleh kebijakan dianggap sebagai publik.

George Frederickson (Pasolong; 2007 : 6-7) menjelaskan konsep publik dalam lima perspektif:

1. “Publik sebagai kelompok kepentingan, yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan kepentingan masyarakat,
2. Publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri,
3. Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, yaitu kepentingan publik diwakili melalui ‘suara’,
4. Publik sebagai konsumen, yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap sebagai publik.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang paling penting”.

Publik adalah manusia yang memiliki kepentingan yang sama membentuk masyarakat menyuarakan kepentingan bersama menuntut adanya pelayanan birokrasi sebagai haknya menjadi warga negara dalam partisipasi penyelenggaraan bernegara. Untuk mengatur pelayanan tuntutan publik pemerintah menetapkan kebijakan yang biasanya disebut kebijakan publik.

#### c. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sering dipakai untuk menunjukkan sesuatu hal khusus yang dibuat oleh pemerintah dari adanya tuntutan-tuntutan publik. Kebijakan publik adalah “apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Santosa; 2012 : 35). Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara apa yang akan dikerjakan pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Carl Friedrich (Santosa;2012 : 35) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “seperangkat tindakan yang dilakukan pemerintah dengan suatu tujuan dan diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan, dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternatif yang ada.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan yang sama dirumuskan Anderson (Santosa; 2012 : 35) “kebijakan publik sebagai kegiatan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masala”. Kebijakan publik dipandang sebagai pilihan tindakan yang secara aktual dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Abrar (Mardiana; 2011 : 24) menjelaskan “kebijakan komunikasi merupakan kebijakan publik, dan sebagai kebijakan publik, kebijakan komunikasi memiliki palin tidak lima kriteria, yaitu : (1) memiliki tujuan tertentu; (2) berisi tindakan pejabat pemerintah; (3) memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah; (4) bisa bersifat positif dan negative; dan (5) bersifat memaksa/otoritatif. Kebijakan komunikasi dimaknai seluruh peraturan yang mengatur proses komunikasi masyarakat, termasuk media di dalamnya”.

Kebijakan komunikasi merupakan kebijakan publik yang mana memiliki kriteria adanya tujuan tertentu yang harus dicapai, sehingga dibuat rencana rangkaian usaha-usaha yang akan dilakukan pemerintah kemudian dilaksanakan sehingga menimbulkan adanya dampak yang bersifat memaksa untuk dituruti. Jadi, kebijakan komunikasi merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur seluruh proses komunikasi didalam masyarakat termasuk media penyebarannya. Kebijakan yang dibuat tersebut harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pelaksana kebijakan.

#### d. Public Policy Cycle

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Proses kebijakan publik dilukiskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung diatur menurut urutan waktu. Proses pembuatan kebijakan publik menurut Dunn (2003:45) adalah “serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan”.

**Gambar 2.4**  
**Diagram proses kebijakan public**



**Sumber : Dunn (Subarsono; 2012 : 19)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. “Penyusunan agenda merupakan tahapan perumusan masalah yang memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Formulasi kebijakan merupakan tahapan forecasting (peramalan), memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.
3. Adopsi kebijakan merupakan tahap rekomendasi kebijakan, yang memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
4. Implementasi kebijakan merupakan tahapan monitoring kebijakan, yang mana memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
5. Penilaian kebijakan merupakan tahap evaluasi kebijakan yang memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan”.

Berdasarkan pendapat Dunn diketahui proses kebijakan publik dimulai dari penyusunan agenda dimana sebuah isu berhasil menjadi masalah dan situasi problematik yang dihadapi masyarakat yang menjadi agenda pemerintah. Langkah kedua formulasi masalah, dimana permasalahan dibahas dan dicari pemecahan berbagai alternatif yang ada. Langkah selanjutnya ialah adopsi kebijakan yakni merekomendasikan alternatif-alternatif untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian implementasi kebijakan ialah meralisasikan alternatif yang telah dipilih berupa tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi hakikatnya dampak yang terjadi setelah program dilaksanakan. Evaluasi kebijakan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Keseluruhan proses kebijakan publik saling berkaitan dan penting. Tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keseluruhan proses menentukan kebijakan tersebut berhasil atau tidak.

## 2.6 Pandangan Islam Tentang Implementasi

Surat An-Nahl Ayat 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Surah Al-Hujurat : 06

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِثْلِ  
فُتُصِّبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepadamu membawa berita, maka tangguhkanlah (hingga kamu mengetahui kebenarannya) agar tidak menyebabkan kaum berada dalam kebodohan (kehancuran) sehingga kamu menyesal terhadap apa yang kamu lakukan”

- Hak C**
- Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Surat Al-Baqarah Ayat 119

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka.”

### Surat Al-Baqarah [2:191]

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يَقْتُلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya : “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

### Surat Ali 'Imran Ayat 104

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”

Menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Intisari yang seharusnya menjiwai seluruh kegiatan komunikasi adalah menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan jahat, yang dikenal dengan istilah amar makruf nahi munkar



## 2.7 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

Judul	Rumusan masalah	Tujuan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Studi kelayakan pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal televisi di Kabupaten Banyumas	Bagaimana pendapat masyarakat terhadap rencana didirikannya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal televisi di Kabupaten Banyumas?	Untuk mengetahui usulan masyarakat terhadap rencana didirikannya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Televisi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik	Perbedaan dalam penelitian ini membahas kelayakan pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal televisi di Kabupaten Banyumas dengan implementasi perda	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 didalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran public.
Impementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah menurut Undang undang Nomor 03 tahun 2002 tentang penyiaran	Bagaimanakah kewenangan Komisi penyiaran Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penyiaran	Untuk mengetahui kewenangan apa yang dijalankan Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penyiaran	Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengenai pengimplementasian perda, dan lokasi penelitian	Hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana kewenangan komisi penyiaran Daerah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan penyiaran menjadi suatu hal yang penting sehingga pengimplementasian Undang-undang Nomor 03 tahun 2002 tentang penyiaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-

Judul	Rumusan masalah	Tujuan	Perbedaan	Hasil Penelitian
Pelaksanaan program sistem stasiun jaringan pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal Sumatera Utara Perspektif tanggung sosial media	Hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi para pengelola televisi swasta lokal biro Meda menjalankan agenda program stasiun televisi swasta lokal berjaringan, dalam kerangka pemberdayaan informasi lokal	Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pengelola Lembaga Penyiaran Televisi Swasta lokal berjaringan biro Medan dalam menjalankan agenda program stasiun lokal berjaringan	Perbedaan dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan program dengan implementasi suatu peratauran yang telah ditetapkan	Hasil penelitian dimana pelaksanaan program sistem stasiun jaringan pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal sudah dilaksanakan sesuai dengan system yang berlaku sehingga hal ini dapat memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat terutama didalam menyampaikan setiap informasi-informasi yang penting dan hiburan kepada masyarakat.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan upaya untuk mendefinisikan ruang lingkup masalah penelitian sesuai dengan variabel dan indikator yang telah ditetapkan berdasarkan teori yang nantinya dapat diterapkan untuk melaksanakan pengukuran lapangan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menganalisa penelitian.

**Tabel 2.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Sub indikator
<b>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu</b>	a. Ukuran dan tujuan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggara penyiaran</li> <li>• Pelayanan informasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya</li> </ul>
	b. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber Daya Manusia</li> <li>• Anggaran dan Pendapatan</li> </ul>
	c. Karakteristik agen pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktural LPPL</li> </ul>
	d. Sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemahaman staff LPPL terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu</li> <li>• Respon Staff LPPL terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu</li> </ul>
	e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vertikal</li> <li>• Horizontal</li> <li>• Diagonal</li> </ul>
	f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Internal</li> <li>• Eksternal</li> </ul>

*Sumber : Van Meter dan Van Horn (Agustino;2008 : 144)*

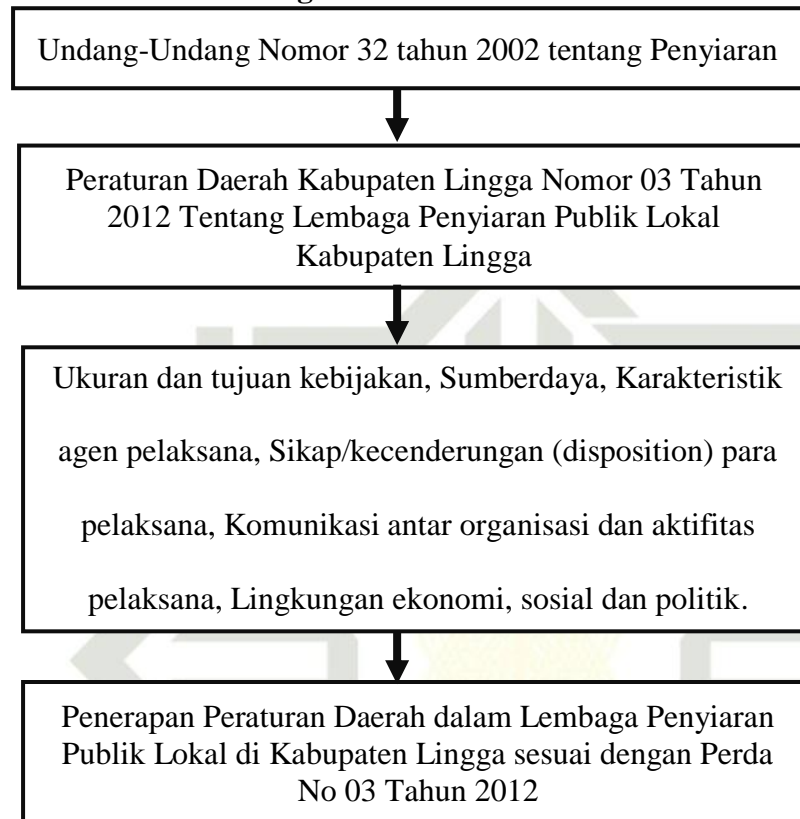
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.9 Kerangka Pemikiran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.5**  
**Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari data-data yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, kemudian dipaparkan secara jelas untuk memberikan gambaran tentang adanya suatu fenomena sosial tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini diwilayah Kabupaten Lingga. Alasan pemilihan lokasi karena LPPL BTM merupakan penyelenggara penyiaran publik milik daerah Kabupaten Lingga baru terbentuk 7 tahun yang lalu. Penelitian ini ingin mengetahui pelaksanaan Perda No 03 tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu sebagai lembaga yang ditunjukan oleh perda untuk menyelenggarakan penyiaran publik lokal. Oleh karena itu, tertarik untuk meneliti proses implementasi Perda Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas penyelenggaraan penyiaran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.3 Objek dan Subjek Penelitian

#### a. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Adapun Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, tentang suatu hal (variabel tertentu)". Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu

#### b. Subjek Penelitian

Sementara subjek penelitian menurut Sugiyono (2013) subyek penelitian merupakan narasumber utama yang dapat memberikan informasi data yang dibutuhkan guna mengungkap permasalahan dalam suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun subjek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Sampel dalam Penelitian**

No	Sampel	Jumlah
1	Dewan pengawas	1 orang
2	Direktur umum dan Direktur program	2 orang
3	Bagian produksi dan teknisi	2 orang
4	Bagian administrasi dan rumah tangga	2 orang
5	Bagian pemasaran dan humas	1 orang
6	Penyiar LPPL RBTM	2 orang



Penelitian ini, melakukan pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu untuk lebih memfokuskan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Karena, dalam teknik *sampling purposive* dibutuhkan orang yang benar-benar memahami bidangnya sebagai sumber informasi penelitian.

#### 4 Sumber dan Jenis Data

Sehubungan dengan kebutuhan penelitian diperlukan data-data yang akurat dan aktual. Untuk itu teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dilapangan dari para informan berupa informasi implementasi Perda Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau laporan tertulis yang mendukung dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Data yang terdiri dari :
  - 1) Gambaran umum Kabupaten Lingga
  - 2) Gambaran umum organisasi dan tata kerja LPPL BTM.
  - 3) Jumlah pegawai LPPL BTM berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, dan masa kerja.
  - 4) Sarana dan prasarana yang dimiliki LPPL BTM
  - 5) Daftar rencana penyiaran publik LPPL BTM
  - 6) Kebijakan penyiaran dan data-data lain yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Teknik dan alat pengumpulan data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka digunakan teknik

#### a. Observasi

Pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan gambaran riil dan objektif tentang perkembangan masalah yang akan diteliti secara nyata atau sebenarnya. Menurut Arikunto (2009;145) observasi adalah “pengamatan langsung, terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, rekaman suara”.

Observasi dalam penelitian ini nonpartisipan, tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang yang diamati. Observasi dilakukan secara terus terang dan tersamar. Dimana dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian. Tetapi dalam suatu saat observasi dilakukan secara tersamar untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

Penelitian ini mengamati kegiatan informan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa : catatan harian dan Check List yaitu daftar yang berisikan catatan-catatan yang bertujuan untuk memberi masukan informasi awal mengenai masalah yang diteliti. Pengamatan secara langsung para pegawai LPPL BTM yang bekerja, untuk melihat proses



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan penyiaran sesuai atau tidak dengan Perda Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dipakai untuk mengumpulkan informasi secara lisan melalui tatap muka langsung dengan informan. “wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan tewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu” (Meolong; 2010:183).

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung lewat tatap muka secara lisan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh informan. Penelitian ini melakukan wawancara semiterstruktur (*semistrukture interview*). Tujuannya menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diajak wawancara tentang pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, alat yang digunakan berupa pedoman wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dan dapat digunakan untuk menjadikan wawancara yang dilakukan lebih terarah. Menggunakan alat perekam dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan kepada para pegawai LPPL BTM yang dijadikan sampel penelitian yang bertujuan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© menggali informasi yang akurat dari informan tentang implementasi perda Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu dalam penyelenggaraan penyiaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data, karena dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan peristiwa yang telah berlalu. Menurut Guna dan Lincoln ((Meolong)2007:216) mengatakan “dokumentasi adalah bahan tertulis atau film”. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengkategorikan dan mengklarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa gambar dan laporan tertulis.

Dalam penelitian, dokumentasi merupakan bahan-bahan tertulis yang terdapat di LPPL berhubungan dengan masalah penelitian. Datanya, berupa laporan maupun kebijakan yang dibuat LPPL BTM sebagai kegiatan untuk melakukan implementasi Perda dalam penyelenggaraan penyiaran

### 3.6 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Meolong (2007;35) menyatakan “analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema seperti yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disarankan oleh data”. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan cara memilah data-data yang penting untuk diuraikan dalam penjelasan-penjelasan kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Pengumpulan data melalui metode analisis data dilakukan setelah selesai tahap wawancara, observasi dan dokumentasi kepada para pegawai PPPL BTM yang dijadikan sampel penelitian dengan cara memilah data yang penting sesuai dengan permasalahan penelitian. Dari data yang telah dipilih, selanjutnya menyajikan data berupa informasi yang telah tersusun untuk diolah menjadi kata-kata yang lebih mudah dibaca dan dipahami.

Kemudian informasi tersebut dianalisa sesuai dengan teori dan digambarkan sesuai dengan temuan lapangan. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menemukan jawaban dari perumusan masalah itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Umum Kabupaten Lingga

Pulau Lingga merupakan salah satu pulau yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Provinsi yang masih muda di Republik Indonesia seiring dengan Azam Kabupaten Lingga yang telah mentasbihkan diri sebagai “NEGERI BUNDA MELAYU” mau tidak mau, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Riau Lingga, harus diungkit kembali dengan tahniah “mengangkat batang terendam”. Sebagai upaya revitalisasi sejarah Kerajaan Lingga. Penulis ingin membuka tabir kejayaan Kabupaten Lingga yang dulunya dikenal seantero dunia sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu”, sehingga Melayu menjadi tuan di negerinya sendiri, dan seperti kata Hang Tuah “Tak Melayu Hilang Di Bumi” akan tetap menjadi kenyataan, sesuai dengan Gurindam dua Belas.

BERTINGKAP ALAM BER-PINTU ILAHI, adalah Motto di pulau yang masih dikatakan baru dijadikan Kabupaten, yakni Kabupaten Lingga, Motto tersebut bukan hanya digunakan untuk masyarakat penganut Agama Islam, melainkan untuk semua pemeluk agama, dan didalamnya banyak terserap Kebudayaan. Karena ditiap budaya yang ada di Negeri kita berpusat pada alam, disetiap pemeluk Agama pasti meyakini adanya Tuhan yang disembah, serta menjadikan moral sebagai nilai-nilai yang sangat dihormati. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Otonomi yang semula 27 Provinsi menjadi



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. provinsi, dan sekarang telah menjadi 34 Provinsi. Pemekaran yang lebih pesat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

provinci, dan sekarang telah menjadi 34 Provinsi. Pemekaran yang lebih pesat terjadi pada Kabupaten dan Kota, karena disitulah fokusnya otonomi daerah.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang masih muda di Republik Indonesia, telah memekarkan daerahnya sehingga sampai tulisan ini ditulis menjadi dua Kota dan lima kabupaten. Dua Kota itu adalah : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sedangkan lima Kabupatennya adalah : Kabupaten Kepulauan Riau yang kemudian berubah menjadi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna. Setelah berbagai usaha ditopang dengan berbagai kondisi daerah, baik dari sisi pertumbuhan penduduk, luas daerah, pendapatan asli daerah serta untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan berbagai aspek lainnya, maka terealisasi cita-cita tersebut dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 (Lembaga Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Nomor 4237). Sedangkan Kabupaten Lingga terbentuk dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4341). Dengan demikian jadilah Kabupaten Lingga sebagai daerah otonom termuda di Provinsi Kepulauan Riau pada saat itu.

Kabupaten Lingga yang Beribukotakan Daik, pada kegemilangan Raja-raja Melayu “tempo dulu” dimana Kerajaan Melayu Riau Lingga terpusat di daerah ini. Kemudian barulah pusat kerajaan berpinddah ke Pulau Penyengat Indra Paksi. Dalam bukti sejarah tersebut peninggalan masa lalu di Daik Lingga dan sekitarnya, terdapat Masjid Sultan yang masih berdiri kokoh setiap saat digunakan masyarakat setempat sebagai pusat ibadah, juga ada bekas kamar 44

1. (empat puluh empat) bilik milik raja sebagai tanda keagungan raja sebagai orang laki-laki, juga masih banyak lagi peninggalan sejarah yang saat ini ditempatkan di museum di ibu Kota Kabupaten Lingga yakni Daik.

Daerah ini terdiri dari 9 kecamatan dengan 75 desa/ kelurahan, yakni Kecamatan Lingga dengan ibukotanya Daik, kecamatan Lingga Utara dengan ibukotanya Pancur, Kecamatan Lingga Timur dengan ibukotanya Sei Pinang, Kecamatan Singkep dengan ibukotanya Dabo, Kecamatan Senayang dengan ibukotanya senayang, Kecamatan Singkep Barat dengan ibukotanya Raya, kecamatan Singkep Pesisir dengan ibukotanya Kote, Kecamatan Selayar dengan ibukotanya Penuba, dan kecamatan Singkep Selatan. Sembilan Kecamatan ini terletak pada tiga pulau yang berbeda. Kecamatan Singkep di pulau Singkep, kecamatan Lingga di pulau Lingga dan Kecamatan Senayang di pulau Senayang. Disamping tiga pulau tersebut, masih banyak pulau-pulau lainnya, karena itulah Kepulauan Riau ini dikenal dengan Negeri Segantang Lada. Di tiap pulau masih menyimpan potensi yang beraneka ragam, Sumber Daya Alam Pulau Lingga dengan hutannya yang sangat lebat serta bersuhu udara yang dingin, karena terdapat Gunung Daik, yang menjadikan pulau ini subur, terdapat banyak rawa-rawa di daerah ini untuk ditanami sagu sebagai tanaman utamanya. Lingga dikenal sebagai penghasil sagu yang tidak saja di konsumsi masyarakat setempat, tetapi juga di ekspor keluar negeri.

#### 4.2 Kabupaten Lingga dan Geografis

Kabupaten Lingga yang terletak diantara 0 derajat 20 menit Lintang Utara dengan 0 derajat 40 menit Lintang Selatan dan 104 Bujur Timur dan 105

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bujur Barat. Dengan luas Daratan serta lautan 211.772 km persegi, dan lautan 209.654,28 km persegi. Wilayah ini terdiri dari 377 buah pulau besar dan kecil, dalam survey terakhir terdapat pulau sebanyak 512 pulau, hal ini dengan melihat dari sistem pasang surut air laut yang antara lain karena saat pasang besar antara satu pulau dengan pulau lainnya berpisah, dan saat air surut terlihat pulau-pulau tersebut menyatu, karena disatukan oleh karang yang ada. Tidak kurang dari 92 pulau diantaranya sudah dihuni dan selebihnya belum berpenghuni, namun sebagian diantaranya dimanfaatkan untuk pertanian, khususnya perkebunan. Batas Daerah Kabupaten Lingga ini ; sebelah Utara berbatasan dengan Kota Batam dan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Bangka dan Selat Berhala, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Indra Giri Hilir, dan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pada umumnya iklim daerah Kabupaten Lingga beriklim tropis, tempratur rata-rata terendah 23 derajat celcius dan tertinggi 30 derajat celcius. Kondisi alam di Kabupaten ini adalah daerah tropis dengan hutan-hutan yang sangat lebat, namun sebagian hutannya telah terjarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan adanya penebangan liar, walau demikian masih banyak menyimpan hutan lindung yang menjadi paru-paru kehidupan alam sekitar.

Mata pencaharian masyarakat di Kabupaten ini beragam, bagian terbesar adalah sebagai petani dan nelayan masih bersifat tradisional, yang lainnya sebagai buruh dipabrik-pabrik pengolahan sagu, pekerja tambang dan berbagai pekerjaan lainnya. Ada beberapa pelabuhan laut yang menjadi urat nadi perekonomian dan transportasi di daerah ini. Pelabuhan Laut di Dabo Singkep bekas peninggalan



1. Unit Penambangan Timah Singkep (UPTS) merupakan pelabuhan utama yang rute pelayarannya Tanjung Pinang, Batam dan Jambi, namun pelabuhan ini masih terganggu cuaca, jika pada musim Selatan pelabuhan ini berombak besar karena menghadap ke laut lepas sehingga sulit untuk dipergunakan. Pelabuhan yang kedua terdapat di Kecamatan Lingga dikenal dengan nama Pelabuhan Tanjung Buton, merupakan pelabuhan penumpang dari dan ke Tanjung Pinang setiap harinya, pelabuhan yang ketiga yakni Pelabuhan Jagoh terdapat di Kecamatan Singkep Barat yang rutennya dari dan Tanjung Pinang setiap harinya, pada umumnya masing-masing kecamatan ada pelabuhan sebagai sarana transportasi barang dan orang, seperti Pelabuhan Pancur, Senayang dan lainnya.

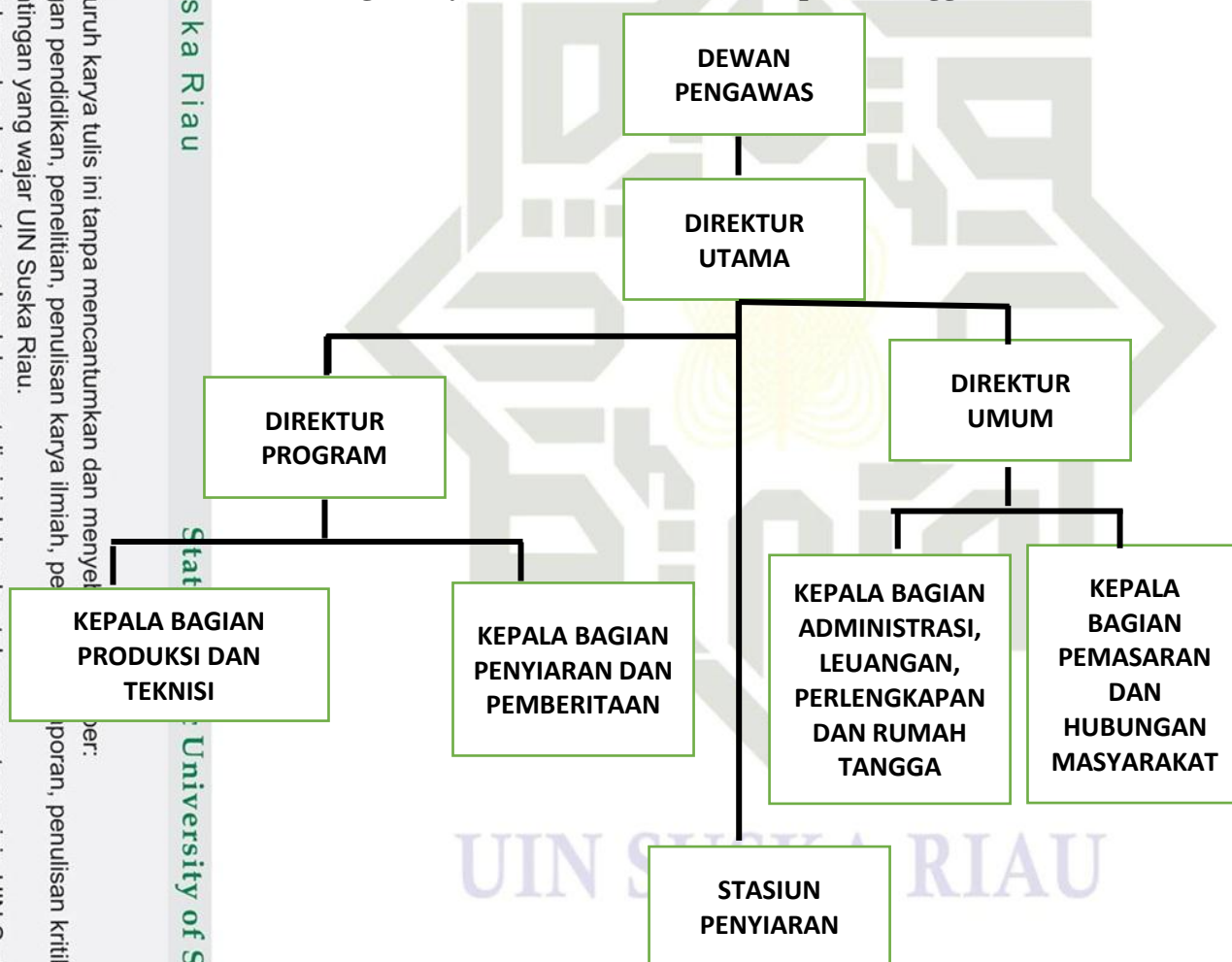
#### 4.3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu

1. Penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam berkomunikasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Lingga. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuknya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu berasal dari Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2008 tentang Pembentukan Radio Bunda Tanah Melayu FM Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal, kemudian di

- ubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.

#### 4.4 Struktur Organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga**



## BAB VI

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) yang sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan didalam pengimplementasian suatu kebijakan peraturan Pemerintah Daerah dengan baik. seperti setiap program yang telah disusun dengan rapi, walaupun dalam memberikan hiburan juga menyampaikan sumber informasi kepada masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Bunda Tanah Melayu Kabupaten Lingga seperti jumlah sumber daya manusia yang dimiliki, anggaran, fasilitas pendukung didalam melaksanakan kebijakan dan kemampuan didalam melaksanakan organisasi.

#### 5.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah dilaksanakan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga agar dapat mengembangkan kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) sebagai salah satu lembaga penyiaran public yang dapat meningkatkan kualitas pemerintah dan mengembangkan perekonomian masyarakat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga lebih memperhatikan lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu (LPPL BTM) dengan menambahkan anggaran untuk meningkatkan mutu salah satunya menambah SDM yang berkualitas didalam menjalankan kegiatan penyiaran yang sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kepada penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan memperpanjang waktu penelitian dan menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abdurachman, Oemi. 2001 *Dasar-dasar Public Relation*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asmu, T. 2013. "Implementasi kebijakan penyiaran pada lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Stasiun Kalimantan selatan". *Jurnal penelitian pers dan komunikasi pembangunan volume 16 Nomor 3, Februari 2013 : 168-182*. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
- Dunn, William. 2003. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, dkk : *pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok –pokok Administrasi publik dan implementasinya*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Mardiana, Lisa. 2011. "ekonomi politik regulasi penyiaran (implementasi kebijakan system stasiun jaringan". *Laporan penelitian iptek*. Fakultas ilmu computer. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Margono, 2004. *Metodelogi penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Moleong, dan Lexy J. 2007. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Muhammad. 2010. *Komunikasi dan regulasi penyiaran*. Jakarta : Kencana.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2005. Diterjemahkan Tri Wibowo Budi Santoso *public policy : pengantar teori dan analisis kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori administrasi publik*. Bandung : Alfabeta.
- Santoso, Pandji. 2012. *Administrasi publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung : PT Refika Aditama.



1. Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. *Reformasi pelayanan publik : teori, kebijakan dan implementasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
  2. Subarsono, AG. 2012. *Analisis kebijakan publik : konsep, teori dan aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
  3. Angiyono, 2005. *Metode penelitian administrasi*. Jakarta : Alfabeta.
  4. Syafii, Inu Kencana. 2006. *Ilmu administrasi publik*. Bandung : Alfabeta
  5. Wahab Solichin, Abdul, 2005. *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
  6. Winarto, Budi. 2012. *Kebijakan publik (teori, proses, dan study kasus)*. Yogyakarta : CAPS.
  7. Wiratno, Liliek Budiastuti. 2011. “publik sebagai sentral layanan lembaga penyiaran publik”. *Jurnal semai komunikasi ; vol II no. 1, Desember 2011: 51-59*; sekolah tinggi ilmu komunikasi (STIKOM), Semarang
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
  10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  11. Sumber lainnya :
    1. Jurnal Mohammad Mufasir (2012), “Study kelayakan pendirian Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Lokal Televisi di Kabupaten Banyumas”
    2. Jurnal Umar (2012), “pelaksanaan program system jaringan pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Sumatera Utara dalam perspektif tanggung jawab media”
    3. Jurnal Mohammad Andika Dermawan (2014) “implementasi kewenangan komisi penyiaran Indonesia daerah Sulawesi tengah menurut undang-undang nomor 32 tahun 2012 tentang penyiaran”
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan penyiaran merupakan sarana yang sangat penting dalam komunikasi massa yang dapat berguna untuk pelayanan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol dan perekat sosial serta pelestarian budaya daerah untuk kepentingan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Lingga;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal, perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA  
dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN  
LINGGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi.
6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Stasiun Penyiaran adalah Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang menyelenggarakan siaran radio maupun televisi lokal.
9. Siaran, penyiaran, penyiaran radio, penyiaran televisi, siaran iklan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Bunda Tanah Melayu.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga penyiaran publik lokal yang bersifat netral dan tidak komersial.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya daerah untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lingga.

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Penyiaran Publik Lokal menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran lokal;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran lokal;
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya Lembaga Penyiaran Publik Lokal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri dari :
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi;
  - c. Stasiun Penyiaran.
- (2) Bagan susunan organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Dewan Pengawas**

##### **Pasal 7**

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, satu diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri atas unsur pemerintah, masyarakat dan praktisi penyiaran.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 8**

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi kepada Bupati;
- e. Mengusulkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama kepada Bupati;
- f. Menetapkan pembagian tugas Dewan Direksi;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Bagian Ketiga**

#### **Dewan Direksi**

##### **Pasal 9**

- (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama sebagai penanggung jawab umum, 1 (satu) orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Program/Operasional.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 10**

Dewan Direksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
- b. Memimpin dan mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- c. Menetapkan ketentuan teknis operasional lembaga dan operasional penyiaran;
- d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyiapkan laporan berkala dan laporan tahunan;
- f. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan;
- h. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam wilayah Kabupaten Lingga maupun di luar wilayah Kabupaten Lingga.

### **Bagian Keempat**

#### **Stasiun Penyiaran**

##### **Pasal 11**

- (1) Stasiun Penyiaran merupakan penyelenggara kegiatan penyiaran Radio maupun televisi lokal yang berlokasi di ibukota Kabupaten Lingga.
- (2) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal hanya menyelenggarakan siaran lokal dan regional.
- (3) Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat mendirikan stasiun cabang pada setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas.

##### **Pasal 12**

Stasiun Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyiaran radio maupun televisi lokal sesuai dengan kebijakan umum ataupun khusus yang ditetapkan oleh Dewan Direksi.

##### **Pasal 13**

Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (2) Tata cara pengangkatan Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

##### Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana (S1) atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Nonpartisan.
- j. Bagi yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) / honorer memiliki rekomendasi dari atasan langsung.

##### Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam sidang dengar pendapat bersama DPRD dan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

#### Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki jabatan rangkap di kelembagaan tersebut;
- j. Nonpartisan;
- k. Bagi yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/honorar harus memiliki rekomendasi dari atasan langsung

#### Pasal 18

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;
  - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota dewan direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas dapat memberhentikan anggota dewan direksi tersebut.
- (9) Kedudukan sebagai anggota dewan direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (11) Apabila salah satu anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan direksi.

#### **Pasal 20**

Persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

#### **Pasal 22**

- (1) Pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

#### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN

### Pasal 24

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal berasal dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendapatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari :
  - a. Siaran Iklan;
  - b. Sumbangan Pengguna Jasa Penyiaran;
  - c. Sumbangan masyarakat;
  - d. Usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran seperti jasa Telekomunikasi, Kupon dan sejenisnya yang dituangkan dalam ikatan perjanjian kerjasama.
- (3) Pendapatan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas daerah.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Radio Bunda Tanah Melayu FM sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Disahkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**BUPATI LINGGA,**

**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 07 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA,**

**KAMARUDDIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19591231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2012 NOMOR 62

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
NOMOR        TAHUN 2012  
  
TENTANG  
  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
KABUPATEN LINGGA

I. UMUM

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin banyakuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran lokal. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Untuk menyikapi perkembangan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai landasan hukum pengaturan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Penyelenggaraan penyiaran di Kabupaten Lingga selama ini berada dibawah koordinasi Kepala subbagian Humas dan Protokoler pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga. Dengan kedudukan tersebut, maka kewenangan dan ruang gerak bagi perkembangan penyiaran publik lokal Kabupaten Lingga menjadi terbatas. Oleh karena itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka keberadaan lembaga penyiaran milik pemerintah daerah harus disesuaikan dengan membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Lingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salah satu pihak yang berbeda pendapat.

Yang dimaksud dengan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Anggota dewan direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk menangani sekurang-kurangnya bidang kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan Kabupaten Lingga.
- Pasal 12  
Cukup jelas
- Pasal 13  
Cukup jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Yang dimaksud tidak melaksanakan tugasnya dengan baik adalah tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kebijakan umum maupun khusus Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Dalam penerapan sanksi pemberhentian, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka akan diberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila yang bersangkutan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka akan dikenakan pemberhentian sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan keputusan secara kolegial adalah setiap anggota dewan pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.  
Ketua dewan pengawas dapat bertindak atas nama dewan pengawas berdasarkan persetujuan anggota dewan pengawas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan pengelolaan secara kolegial adalah setiap anggota dewan direksi memiliki kedudukan dan kewenangan setara dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan bidang tugas masing-masing.  
Direktur Utama dapat bertindak untuk dan atas nama dewan direksi berdasarkan persetujuan anggota dewan direksi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
 NOMOR : 03 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 07 MEI 2012

STRUKTUR ORGANISASI  
 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN LINGGA



BUPATI LINGGA,

H. DARIA



## FOTO DOKUMENTASI

© Hal



rif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5634/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 18 Oktober 2017 M  
27 Muharram 1439 H

Kepada  
Yth. **Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Irwandi  
NIM : 11375104878  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.  
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec**  
NIP. 19711119 200501 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5625/2017  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 18 Oktober 2017 M  
27 Muharram 1439 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

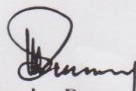
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Irwandi  
NIM. : 11375104878  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : IX (Sembilan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 Tahun 2012  
Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Bunda Tanah Melayu" Untuk itu  
kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan  
kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec  
NIP. 19711119 200501 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL**  
**RADIO BUNDA TANAH MELAYU (BTM) FM**  
**KABUPATEN LINGGA**

Alamat : Jl. Datuk Laksemana Kp. Siak Kelurahan Daik, Lingga Island - Indonesia, Kode Pos : 29872

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No : 02/DUM/BTMFM/VIII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Umum LPPL Radio Bunda Tanah Melayu FM Kabupaten Lingga  
 Menerangkan bahwa :

Nama : IRWANDI  
 NIM : 11375104878  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Telah melakukan penelitian pada :

Hari/tanggal : 13 Desember 2017 s/d 13 Juni 2018  
 Tempat : LPP Lokal Radio Bunda Tanah Melayu FM  
 Judul : "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
 LOKAL KABUPATEN LINGGA".

Demikian Surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 31 Agustus 2018  
 LPP Lokal Radio Bunda Tanah Melayu

Direktur Umum

**AL MURTAADHA AMYUFARLI**





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/9462  
TENTANG



182010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5625/2017 Tanggal 18 Oktober 2017**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : IRWANDI
2. NIM / KTP : 11375104878
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL BUNDA TANAH MELAYU
7. Lokasi Penelitian : RADIO BUNDA TANAH MELAYU KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPRI

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 1 November 2017  
a.n. GUBERNUR RIAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720628 199703 2 004

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. GUBERNUR KEPRI
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**IRWANDI**, lahir di Daik, Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 Agustus 1995 merupakan anak pertama dari 2 (dua), lahir dari pasangan Ayahanda Marzuki dan Ibunda Maryani. Pada tahun 2001 memulai pendidikan di SDN 036 Lingga Kabupaten Lingga.

Lulus pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada SMP N 1 Lingga selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Tamat dari SMP N 1 Lingga tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA N 1 Lingga selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Kemudian pada tahun 2013 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 1 (satu bulan) di kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 03 tahun 2012 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal."** di bawah bimbingan langsung Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tanggal 23 April 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah